**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)
PADA UAKPB BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR
PENYAKIT (B2P2VRP) SALATIGA
PERIODE TAHUNAN TA. 2023**

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka setiap Satuan Kerja Kementerian melakukan pencatatan/pembukuan, inventarisasi dan melaporkan Barang Milik Negara yang digunakan dalam mendukung Tupoksinya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) setiap Semester dan Tahunan.

Laporan Barang Kuasa Pengguna disajikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara khususnya terkait dengan transaksi perolehan Barang Milik Negara yang berasal dari Belanja Anggaran dan perolehan lain yang sah.

Catatan Atas Laporan Barang Kuasa Pengguna merupakan pengungkapan ataupun penjelasan atas rincian data Barang Milik Negara baik ekstrakomtabel, intrakomtabel dan gabungan ekstrakomtabel dan intrakomtabel yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kementerian Kesehatan dan informasi penting lainnya.

I.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5533;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
- 21) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat;
- 22) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.06/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);
- 25) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/Per/I/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Barang, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinator Pelaksanaan APBN yang di Daerahkan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan);
- 26) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan;
- 27) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 28) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KU/Menkes/471/VIII/2013 tentang Kebijakan Akutansi Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan;
- 29) Surat Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-171/KN/2015 tanggal 14 Februari 2015 hal Penjelasan Catatan Ringkas Barang.

I.3. Entitas Pelaporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini mencakup seluruh transaksi perolehan Barang Milik Negara di lingkungan UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Belanja Anggaran dan perolehan lain yang sah.

UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pengguna anggaran/pengguna barang sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perbendaharaan pemerintah, sebagaimana disebutkan tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

I.4. Periode Laporan

Periode Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah per-tanggal (1 Januari s.d. 31 Desember 2023) dengan nilai Barang Milik Negara pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 82.583.600.784,- dan terjadi akumulasi penyusutan Barang Milik Negara atas aset tetap sebesar Rp 53.662.378.873,- sehingga nilai Netto Barang Milik Negara pada akun Neraca sebesar Rp 28.921.221.911,-

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2015 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya. Asal perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara yang telah diperoleh Satuan Kerja harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2015 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Petunjuk teknis tentang kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Kebijakan Penatausahaan dan Pengelolaan (Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, Hibah) Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan dan Hibah Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin dalam pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan.

Untuk memudahkan Satuan Kerja mengimplementasikan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara, maka Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan beberapa keputusan dan Surat Edaran yaitu :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/MENKES/SK/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Protap Penatausahaan Barang Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1816/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Protap Akuntansi Persediaan, Nomor 362/MENKES/SK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Surat Edaran Nomor KN.02.03/III/991/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Pengelolaan Rumah Negara Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat maka Penerapan Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara dimulai pada periode pelaporan Semester I tahun 2013. Metode yang digunakan garis lurus tanpa ada nilai residu.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Tanah;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Bila terjadi normalisasi data dalam proses migrasi maka Satuan Kerja harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi fisik barang;
2. Jika barang tersebut secara fisik ada maka dilakukan entry pada menu Saldo Awal;
3. Jika barang tidak diketemukan dan/atau sudah dilakukan penghapusan dan/atau transfer keluar maka Pimpinan Satuan Kerja membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan permasalahan tersebut;
4. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut maka Barang Milik Negara tidak perlu dilakukan entry. Proses tindak lanjut atas normalisasi data Barang Milik Negara diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara hasil pengadaan Kantor Pusat yang diserahkan-operasikan ke Pemerintah Daerah tetap dicatat dan disajikan sebagai Persediaan dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca (SIMAK-BMN), namun tidak disajikan pada Neraca (SAKPA). Akibat perbedaan perlakuan akuntansi tersebut menyebabkan data dari keduanya berbeda, untuk itu agar dibuat penjelasan yang memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
2. Barang Milik Negara hasil pengadaan Kantor Pusat yang sudah diserahkan-operasikan ke Pemerintah Daerah yang telah dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap (dalam SIMAK-BMN), agar direklasifikasi ke dalam akun "Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah".
3. Barang Milik Negara yang berada pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum TA 2011 tetap dicatat dan disajikan sebagai "Aset yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah" dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca (SIMAK-BMN), namun tidak disajikan pada Neraca (SAKPA). Akibat perbedaan perlakuan akuntansi tersebut menyebabkan data dari keduanya berbeda, untuk itu agar dibuat penjelasan yang memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
4. Dalam hal terdapat Barang Milik Negara yang secara fisik tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, agar tidak disajikan pada neraca SAKPA namun tetap diungkapkan pada CaLBMN dan CaLK.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 merupakan Laporan yang mencakup transaksi perolehan dan mutasi Barang Milik Negara yang terjadi selama Tahun 2023. Dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan aplikasi Persediaan dihasilkan Laporan Barang Kuasa Pengguna yang terdiri dari :

1. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
2. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca;
3. Laporan Barang Persediaan;
4. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
5. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
6. Laporan Aset Tak Berwujud;
7. Laporan Kondisi Barang
8. Laporan Penyusutan Barang Milik Negara;

9. Laporan Barang Rusak Berat yang telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
10. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahun Anggaran 2023.
11. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

- Saldo per 31 Desember 2022 pada neraca sebesar :

Nilai BMN	76.612.844.923
Akumulasi Penyusutan	48.776.380.668 -
Nilai Netto BMN pada neraca	27.836.464.255
- Saldo awal per 1 Januari 2022

Nilai saldo awal Barang Milik Negara per 1 Januari 2022 adalah sebesar :

Nilai Intra Komptabel dalam neraca	27.836.464.255
Nilai Ekstrakomptabel	109.643.964 +
	27.946.108.219

Nilai mutasi Barang Milik Negara berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Ringkasan mutasi Barang Milik Negara UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.100.374.087,-, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 4.882.287.242,- dan total mutasi persediaan selama Periode Tahunan laporan sebesar Rp. -2.781.913.155,-

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	4.585.897.842	-2.588.419.579	1.997.478.263
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.630.800	-1.366.176	264.624
117199	Persediaan Lainnya	294.758.600	-192.127.400	102.631.200
	JUMLAH	4.882.287.242	-2.781.913.155	2.100.374.087

2. Tanah

Tanah yang saat ini digunakan di UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 yang dilaporkan adalah sebesar Rp 0,-

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah Senilai Rp 60.477.276.907,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	54.912.163.285
Mutasi	Rp	5.565.113.622
Jumlah	Rp	<u>60.477.276.907</u>

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

➤ Pembelian, berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nilai
1	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	24	206.450.000
2	Anemometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1	1.400.000
3	Lemari Kayu	2	17.193.900
4	Rak Besi	34	62.900.000
5	A.C. Window	7	49.800.000
6	Tripod Camera	1	3.400.000
7	Dehumidifier (Humidity Control)	1	7.524.300
8	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1	4.000.000
9	Gene Amp Pcr System	1	970.000.000
10	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	2	7.000.000
11	Refrigerator Centrifuge	1	134.350.000
12	PC-Based UV Gel Documentation System	1	315.500.000
13	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1	222.000.000
14	Multichannel Pippete Dispenser	2	17.600.000
15	Stabilizer/UPS	2	51.000.000
16	Vortex Mixer	2	9.600.000
17	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	2	140.082.000
18	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	1	12.300.000
19	Fluorosence Meter	1	88.000.000
20	Lap Top	1	18.950.000
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	12.050.000
TOTAL			2.351.100.200

- Transfer Masuk, berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nilai
1	Alat Laboratorium Umum Lainnya	1	14.066.175
2	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	3	1.770.833.955
3	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	45.662.661
			1.830.562.791

- Hibah Masuk, berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nilai
1	Lemari Besi/Metal	6	11.150.000
2	Rak Besi	2	4.800.000
3	Locker	4	6.090.000
4	Meja Kerja Besi/Metal	14	123.220.000
5	Mesin Cuci	1	9.750.000
6	Humidifier	2	19.010.000
7	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	2	19.500.000
8	Kandang Logam untuk Penelitian	1	9.500.000
9	Data Logger (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	5	56.250.000
10	P.C Unit	1	18.250.000
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.550.000
			280.070.000

- Saldo Awal, berupa 1 unit Elevator/Lift sebesar Rp. 1.098.380.631,- (berasal dari Perubahan Nilai Berkurang dari Gedung Bangunan Laboratorium Terpadu).
- Reklase dari Aset Lainnya ke Aset Tetap, berupa penggunaan kembali 1 unit Gas Chamber yang sudah sudah di hentikan penggunaannya sebesar Rp. 5.000.000,-.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Besaran akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah Rp 49.836.868.599,-

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 20.601.002.410,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	20.190.360.171
Mutasi	Rp	410.642.239
Jumlah	Rp	<u>20.601.002.410</u>

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 1.098.380.631,- (dari Gedung Laboratorium Permanen di koreksi ke Peralatan Mesin berupa Elevator/Lift)
- Pengembangan melalui KDP, berupa Pembangunan 1 unit Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.343.218.870,-.
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, berupa perjalanan dinas untuk penyelesaian dokumen pembangunan gedung sebesar Rp. 6.150.000,-.
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi, berasal dari hibah masuk Aset Tetap Renovasi dari Yayasan Save The Children atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 159.654.000,-.

Akumulasi Gedung dan Bangunan.

Besaran akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah Rp 3.470.041.124,-

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 748.198.300,-. Nilai tersebut juga merupakan nilai saldo awal tanpa ada mutasi tambah atau mutasi kurang yang terjadi selama Tahun 2023.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Besaran akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah Rp 355.469.150,-

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 757.123.167,- Nilai tersebut juga merupakan nilai saldo awal tanpa ada mutasi tambah atau mutasi kurang yang terjadi selama Tahun 2023.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Besaran akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 Rp 0,-

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	-
Mutasi	Rp	-
Jumlah	Rp	-

8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.419.280.167,-. Nilai tersebut juga merupakan nilai saldo awal tanpa ada mutasi tambah atau mutasi kurang yang terjadi selama Tahun 2023.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Besaran akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 Rp 1.410.660.925,-

9. Barang Milik Negara yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo Barang Milik Negara yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 0,-.

Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 0,-

V. BARANG MILIK NEGARA PADA UAKPB BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT SALATIGA PERIODE TAHUNAN TA. 2023

a. Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 31.139.859.204,-, yang diperoleh dari Nilai Total Aset sebesar Rp. 86.212.899.002 dikurangi penyusutan Nilai BMN sebesar Rp. 55.073.039.798. Nilai Barang Milik Negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai Barang Milik Negara dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2.100.374.087	2%	0	0%	2.100.374.087	2%
	Sub Jumlah (1)	2.100.374.087	2%	0	0%	2.100.374.087	2%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	60.477.276.907	70%	103.226.500	94%	60.580.503.407	70%
3	Gedung dan Bangunan	20.601.002.410	24%	6.417.464	6%	20.607.419.874	24%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	748.198.300	1%	0	0%	748.198.300	1%
5	Aset Tetap Lainnya	757.123.167	1%	0	0%	757.123.167	1%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
	Sub Jumlah (2)	82.583.600.784	96%	109.643.964	100%	82.693.244.748	96%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	1.419.280.167	2%	0	0%	1.419.280.167	2%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0%	0	0%	0	0%
	Sub Jumlah (3)	1.419.280.167	2%	0	0%	1.419.280.167	2%
	Total	86.103.255.038	100%	109.643.964	100%	86.212.899.002	100%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	49.836.868.599	90%	0	0%	49.836.868.599	90%
2	Gedung dan Bangunan	3.470.041.124	6%	0	0%	3.470.041.124	6%
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	355.469.150	1%	0	0%	355.469.150	1%
4	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%
	Sub Jumlah (1)	53.662.378.873	97%	0	0%	53.662.378.873	97%
II	Aset Lainnya						
1	Aset Tidak Berwujud	1.410.660.925	3%	0	0%	1.410.660.925	3%
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0%	0	0%	0	0%
	Sub Jumlah (2)	1.410.660.925	3%	0	0%	1.410.660.925	3%
	Total	55.073.039.798	100%	0	0%	55.073.039.798	100%

b. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	Persediaan	2.100.374.087	2.100.374.087	0
2	Tanah	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin	60.477.276.907	60.477.276.907	0
4	Gedung dan Bangunan	20.601.002.410	20.601.002.410	0
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	748.198.300	748.198.300	0
6	Aset Tetap Lainnya	757.123.167	757.123.167	0
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Aset Tak Berwujud	1.419.280.167	1.419.280.167	0
9	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0
10	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0	0
Total		86.103.255.038	86.103.255.038	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah jumlah nilai Barang Milik Negara berupa kemitraan dengan pihak ketiga dan Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

VI. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Semester 2/2021	52.757.720.959	5.179.546.596	111%
2	Semester 1/2022	40.615.464.369	-2.876.240.072	93%
3	Semester 2/2022	35.418.369.292	-8.073.335.149	81%
4	Semester 1/2023	27.804.770.904	-13.757.749.723	67%
5	Semester 2/2023	31.139.859.204	-11.617.116.034	73%

2. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Penghapusan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara dengan kondisi Rusak Berat yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 0,- yang merupakan nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel.

3. Barang Milik Negara yang diperoleh dari Hibah/Transfer
 Nilai Barang Milik Negara yang diperoleh dari Hibah/Transfer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP Salatiga) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan
1	Persediaan	534.543.047
2	Peralatan dan Mesin	2.110.632.791
3	Aset Tetap Renovasi	159.654.000
Total		2.804.829.838

Rincian :

- Persediaan diperoleh dari Transfer Masuk sebesar Rp. 483.531.047,-
- Persediaan diperoleh dari Hibah Masuk sebesar Rp. 51.012.000,-
- Peralatan dan Mesin diperoleh dari Transfer Masuk sebesar Rp. 1.830.562.791,-.
- Peralatan dan Mesin diperoleh dari Hibah Masuk sebesar Rp. 280.070.000,-.

4. Realisasi belanja yang mengakibatkan kapitalisasi pada aset.

a. Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal yang ada pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Tahun 2023 adalah bertambah sebesar Rp 5.975.755.861,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Kode Akun Neraca	Uraian Akun Neraca	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	132111	Peralatan dan Mesin	1.098.380.631	Saldo Awal (Koreksi atas Bangunan Gedung Laboratorium)
2	132111	Peralatan dan Mesin	2.351.100.200	Pembelian
3	132111	Peralatan dan Mesin	1.830.562.791	Transfer Masuk
4	132111	Peralatan dan Mesin	280.070.000	Hibah Masuk
5	166112	Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.000.000	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
6	133111	Gedung dan Bangunan	6.150.000	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah
7	133111	Gedung dan Bangunan	159.654.000	Penerimaan ATR
8	133111	Gedung dan Bangunan	1.343.218.870	Pengembangan melalui KDP
9	133111	Gedung dan Bangunan	(1.098.380.631)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (menjadi Peralatan Mesin)
TOTAL			5.975.755.861	

5. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara
Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain : -

Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan perlu dilakukan langkah-langkah strategis antara lain sebagai berikut : -

Mengetahui,
Kepala B2P2VRP Salatiga

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH
NIP. 196805251992031004